

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pembahasan tentang 1.1 hal-hal yang melatarbelakangi penelitian, 1.2 identifikasi masalah penelitian, 1.3 rumusan masalah penelitian, 1.4 tujuan penelitian, 1.5 manfaat penelitian, dan 1.6 struktur organisasi penelitian.

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan komponen penting dalam majunya peradaban suatu bangsa sesuai dengan amanat UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 pasal 3 yang mengatakan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.” Banyak upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Semakin tinggi kehidupan sosial masyarakat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka semakin meningkatkan tuntutan kebutuhan kehidupan sosial masyarakat. Pada akhirnya tuntutan tersebut bermuara pada pendidikan, karena masyarakat meyakini bahwa pendidikan mampu menjawab dan mengantisipasi berbagai tantangan tersebut.

Pendidikan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah sebagai institusi tempat masyarakat berharap tentang kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Pendidikan perlu perubahan dan peningkatan yang dapat dilakukan melalui pengelolaan atau manajemen pendidikan di sekolah (Nanang Fattah, 2004). Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui layanan Pendidikan sesuai 8 Standar Pendidikan Nasional. Istilah mutu sementara ini sama artinya dengan kualitas. Sehubungan dengan kualitas ini, (Vincent Gaspersz, 2003) mengemukakan bahwa : 1) Kualitas terdiri dan sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan dengan demikian memberikan kepuasan atas penggunaan produk itu 2) Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan.

Dalam bidang pendidikan yang menjadi pelanggan layanan jasa adalah para siswa, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena itu 8 standar nasional pendidikan

merupakan barometer mutu layanan pendidikan di sekolah. Mutu layanan pendidikan merupakan jaminan bahwa proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah akan sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi dan sesuai pula dengan harapan yang dijadikan *pagu/benchmark* (Kebijakan Akreditasi Sekolah Depdiknas, 2004). Hal tersebut dapat terlaksana bila bentuk pelaksanaan pengelolaan sekolah menggunakan prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS) sesuai amanat UU Sisdiknas no 20 tahun 2003 pasal 51 ayat 1 tentang Pengelolaan satuan pendidikan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS). Alasannya dalam meningkatkan mutu, memandirikan, dan memberdayakan sekolah melalui kemandirian, pemberian otonomi, partisipasi, dan inisiatif sekolah maka proses belajar mengajar berlangsung optimal dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan sehingga sekolah akan lebih mengetahui kekuatan serta kelemahannya, oleh karena itu harus melibatkan warga sekolah dan masyarakat dalam mengambil segala keputusan (Nurkolis, 2003). Keberhasilan sebuah sekolah biasanya ditentukan oleh sejauhmana tujuan pendidikan itu dapat tercapai pada periode tertentu sesuai dengan lamanya pendidikan yang berlangsung di sekolah. Oleh karena itu muncullah sekolah efektif dan sekolah tidak efektif. Sekolah efektif mempunyai tingkat ketersesuaian yang tinggi antara apa yang telah dirumuskan untuk dikerjakan dengan hasil yang dicapai sekolah.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai terjemahan dari *School Based Management*, adalah “model manajemen sekolah yang memberikan otonomi kepada sekolah, untuk bertanggungjawab dan berwenang mengambil keputusan sesuai kemampuan, kebutuhan dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dan sebagainya), dilayani dengan tetap selaras dengan kebijakan pendidikan nasional (Aminah Siti, dkk, 2015; Suhardan dadang, 2014; Sujanto Bedjo, 2007).

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam desentralisasi pendidikan bertujuan dan berperan memperkuat kehidupan berdemokrasi melalui desentralisasi kekuasaan, sumber daya dan dana ke masyarakat tingkat sekolah (Sujanto Bedjo dalam Sapari, 2007), namun

Nauli Susilawati, 2019

**STRATEGI PARTISIPASI KOMITE SEKOLAH DASAR DALAM MENINGKATKAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN DI KECAMATAN SUBANG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penerapannya secara menyeluruh sebagai realisasi desentralisasi pendidikan memerlukan perubahan-perubahan mendasar terhadap aspek-aspek yang menyangkut pada pelaksanaan partisipasi masyarakat dan komite sekolah (Kemendikbud,2013).

Desentralisasi pendidikan yang paling mendasar yaitu ada pada tingkat sekolah. Pada tataran atau level sekolah, otonomi pendidikan dilaksanakan melalui program Manajemen Berbasis Sekolah (Jalal, 2004; Bandung, 2012) dengan komite sekolah sebagai wadah pemberdayaan partisipasi masyarakat. Berdasarkan UU Sisdiknas no 20 tahun 2003 pasal 56 (3) bahwa “Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan Pendidikan”.Upaya penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan proses pelaksanaan mutu layanan pendidikan secara nyata dalam masyarakat. Persoalan mutu layanan pendidikan tentu erat kaitannya dengan aspek manajemen strategi yang diterapkan oleh seorang manajer dalam suatu organisasi lembaga pendidikan agar dapat menerapkan UU Sisdiknas Pasal 51 ayat 1 bahwa “pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”.

Sejak diberlakukannya peraturan baru setelah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang mengatakan bahwa “Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal; bahwa dukungan dan peran serta masyarakat perlu didorong untuk bersinergi dalam suatu wadah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang mandiri.” Berdasarkan isi keputusan tersebut implementasinya lebih kepada pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah agar sekolah dapat bekerjasama dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Seiring dengan waktu pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang komite sekolah yaitu tanggal 30 Desember 2016 Permendikbud no 75 tahun 2016 yang mengamanatkan bahwa “Untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan perlu dilakukan revitalisasi tugas komite sekolah berdasarkan prinsip gotong royong.” Hal ini banyak mengalami perubahan yang signifikan diantaranya telah dibenahi dengan peraturan pada pasal 6 ayat 3 bahwa pengurus komite sekolah ditetapkan oleh kepala Sekolah. Dengan fenomena tersebut Susi Fatimah, Jurnalis okezone news, Senin 16 Januari 2017, 11:17 WIB menuliskan “Permendikbud 75 Tahun 2016, komite sekolah bukan lagi tukang stempel kepala sekolah”.

Saat ini komite sekolah harus bertanggung jawab membantu sekolah dalam peningkatan mutu layanan pendidikan. Hal tersebut tercantum dalam Permendikbud no 75 tahun 2016 bahwa “komite sekolah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan bertugas untuk a) memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, b) menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya, c) mengawasi pelayanan pendidikan, dan d) menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah.” Oleh karena itu untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu partisipasi komite sekolah sangat diperlukan.

Namun perlu diakui pada kenyataannya berdasarkan hasil study pendahuluan terdapat beberapa sekolah baik sekolah dasar negeri yang mandiri maupun sekolah dasar negeri kompleks di Kecamatan Subang yang merupakan piloting dari kecamatan lain ditemukan sebagian besar sekolah kurang memperhatikan mutu layanan pendidikan sesuai dengan kinerja sekolah yang termuat dalam evaluasi diri sekolah (EDS) yang berfungsi sebagai alat menilai secara internal, benar dan jujur, keseluruhan kinerja sekolah dilihat dari 8 Standar Nasional Pendidikan yang hasilnya merupakan dasar penulisan Rencana Pengembangan Sekolah/Rencana Kerja Sekolah (RPS atau RKS)

Selain itu hubungan sekolah dengan masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan, yang mana secara otonomi direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi sendiri oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah kurang melibatkan semua *stakeholders* sekolah. Oleh karena itu sekolah perlu

Nauli Susilawati, 2019

**STRATEGI PARTISIPASI KOMITE SEKOLAH DASAR DALAM MENINGKATKAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN DI KECAMATAN SUBANG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

memahami dan menerapkan MBS sebagai proses pemberdayaan dalam upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk memegang kontrol atas diri dan lingkungannya, adanya kesamaan dan kesepadanan kedudukan dalam hubungan kerja, penggunaan pendekatan partisipatif. Dari beberapa hal tersebut berpengaruh pada berpartisipasi komite sekolah dalam melaksanakan tugasnya diantaranya memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait dengan kebijakan program-program sekolah, membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS), menentukan kriteria kinerja sekolah tidak efektif, kurang ikut berpartisipasi secara langsung terutama dalam memberi gagasan, usulan dan pemberian saran yang kurang optimal.

Temuan lain di lapangan dari hasil wawancara dengan para kepala sekolah di lingkungan Kecamatan Subang mengatakan ekonomi orang tua siswa beragam sehingga sangat diperlukan partisipasi komite sekolah dalam menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya, namun hal itu jauh dari kenyataan sebab adanya kendala keterkaitan dengan istilah “pungli”, dan adanya momen untuk menyerang sekolah bagi para Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sehingga partisipasi komite sekolah kurang berperan. Realitasnya dibuktikan dari hasil wawancara dengan kepala sekolah SDN Karangayar yang hanya memiliki sedikit karakteristik sebagai sekolah efektif mengemukakan bahwa “partisipasi komite sekolah dalam menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya sudah berjalan namun dikarenakan kesibukan dalam profesi kerjanya maka komite sekolah hanya sebatas pengesahan tanda tangan proposal kegiatan dan laporan saja sedangkan penggalangan dana tetap sekolah yang bekerja selain itu partisipasi orang tua siswa dalam kehadiran rapat yang lebih banyak hadir ibu-ibu kurang mendukung terhadap program-program sekolah.” Namun sangat bertolak belakang pada hasil wawancara dengan kepala sekolah SDN Rosela Indah yang memiliki banyak karakteristik yang sesuai dengan ketentuan sekolah efektif. Peneliti mendapat informasi dari pengawas sekolah dasar gugus X bahwa yang paling utama adalah munculnya partisipasi masyarakat terutama dari komite sekolah serta *steholders* yang sangat mendukung penuh dalam segala program-program sekolah sehingga dapat berhasil menjadi sekolah efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Nauli Susilawati, 2019

**STRATEGI PARTISIPASI KOMITE SEKOLAH DASAR DALAM MENINGKATKAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN DI KECAMATAN SUBANG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Ironisnya saat ini komite sekolah yang telah berusia sekitar 16 tahun (2002-2018) masih terdengar adanya opini dikalangan masyarakat luas bahwa komite sekolah belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal seperti yang diharapkan sehingga masih perlu peningkatan terhadap aspek-aspek yang menyangkut pada pelaksanaan partisipasi komite sekolah. Berdasarkan hal tersebut perlu kiranya dirumuskan sebuah strategi yang dapat meningkatkan partisipasi komite sekolah melalui tahapan manajemen strategi dengan menganalisis lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan ancaman-ancaman yang dapat mempengaruhi perkembangan mutu layanan pendidikan, dan menganalisis lingkungan internal sekolah untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan sekolah agar diketahui rekomendasi strategi yang digunakan sekolah untuk memotivasi partisipasi komite sekolah dasar dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di Kecamatan Subang.

Sosialisasi peraturan baru pengganti Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tersebut masih belum merata. Pada saat ini yang lebih penting adalah bukan lagi soal membentuknya, tetapi bagaimana keputusan dan tindakan yang menghasilkan program kegiatan dan implementasinya untuk mencapai tujuan. Merencanakan strategi partisipasi komite sekolah sangat penting agar komite sekolah memiliki sasaran yang tepat dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Keikutsertaan komite sekolah dalam memberikan saran, gagasan, kritik membangun, dukungan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan merupakan bentuk partisipasi yang perlu ditingkatkan agar terjadi sinergi dan terintegrasi dengan berbagai sumber daya Pendidikan. Komite sekolah merupakan suatu badan yang bersifat independen dengan asas keadilan dan kemanusiaan, tetapi mempunyai sumbangan yang berarti terhadap mutu layanan pendidikan.

Upaya menumbuhkan prakarsa dan partisipasi ketua komite sekolah yang berkaitan dengan keputusan pengelolaan pendidikan hendaknya diambil dan bertumpu pada sekolah serta masyarakat. Usaha ini diharapkan mampu mendorong kemajuan sekolah tanpa meninggalkan nilai-nilai setempat dengan memperluas basis mitra sekolah. Pihak sekolah hendaknya bekerjasama dengan komite sekolah dalam pelaksanaan pendidikan dalam usaha peningkatan mutu pendidikan. Selama

ini sekolah terkesan memperlakukan komite sekolah hanya sebagai pelengkap, sehingga terbentuk opini bahwa sekolah merupakan tanggung jawab pemerintah saja. Hal tersebut akan terhindar bila keterlibatan komite sekolah sesuai dengan perannya sehingga aktivitas-aktivitas yang diharapkan mampu membangkitkan partisipasi aktif komite sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Beberapa peneliti sebelumnya, baik berbentuk skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal nasional dan internasional telah mendeskripsikan partisipasi komite sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan. Hal ini menunjukkan betapa urgennya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan diantaranya: jurnal yang dilakukan oleh Alpres Tjuana tentang memberdayakan komite sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Sebagaimana laporan penelitian yang dilakukan oleh Govinda (2000) "*school autonomy and efficiency some critical issues and lessons*" menjelaskan bahwa di Amerika dan Australia, peran serta orang tua dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sangat tinggi. Hal itu tercermin dalam pembayaran pajak masyarakat yang dialokasikan pemerintah negara untuk pendidikan. Persoalan yang diangkat adalah bagaimana memberdayakan komite sekolah untuk berperan optimal dalam meningkatkan mutu layanan di tingkat satuan pendidikan, dan bagaimana strategi pemberdayaannya. Hasil kajian peneliti tersebut bahwa partisipasi yang dilakukan oleh komite sekolah menunjukkan upaya peningkatan kualitas pendidikan terus-menerus dilakukan baik secara konvensional maupun inovatif. Sedangkan strategi pemberdayaannya dilihat dari kondisi dan keprihatinan terhadap kualitas pendidikan dengan optimal. Pemberdayaan komite sekolah dilakukan secara *bottom up* oleh dewan pendidikan.

Penelitian yang dilakukan Balitbang Diknas RI (dalam Nurkholis, 2008) menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian guru, tingkat partisipasi orang tua siswa dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah rendah, yaitu rata-rata hanya 57,1%. Partisipasi orang tua yang sangat rendah ialah dalam hal penentuan program sekolah dan mengawasinya, pertemuan rutin, kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan iklim sekolah.

Secara teoritik, tampaknya tidak mudah mendorong dan menggalang komite sekolah untuk berpartisipasi secara luas terhadap sekolah. Karena konsep

Nauli Susilawati, 2019

**STRATEGI PARTISIPASI KOMITE SEKOLAH DASAR DALAM MENINGKATKAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN DI KECAMATAN SUBANG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

partisipasi secara substantif adalah keterlibatan atau peran serta komite sekolah dan masyarakat secara sukarela baik pemikiran ataupun materi serta tenaga yang mereka miliki untuk bersama-sama mengelola pendidikan di sekolah. Hingga pada tahap puncaknya adalah komite sekolah memahami dan menyadari bahwa lembaga sekolah adalah milik bersama dan menjadi simbol kemajuan bersama. Hal ini, menurut Harper (1986) dan baldridge (1975), seperti dikutip Faisal, bahwa “Partisipasi atau pendukungnya senantiasa bersifat sukarela, mereka bergabung atas dasar pilihan atau ketetapan hati yang sifatnya sukarela”.

Berdasarkan pertimbangan para ahli, yaitu dosen pembimbing akademik program studi administrasi pendidikan di UPI Bandung ditemukan bahwa untuk meningkatkan partisipasi komite sekolah diperlukan suatu strategi yang dilakukan sekolah untuk menumbuh kembangkan partisipasi (peran serta) komite sekolah dalam melaksanakan mutu layanan pendidikan. Strategi tersebut dapat dirancang melalui langkah-langkah strategis dengan membuat analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities and Threats*), yang dimulai dengan identifikasi masalah yang dihadapi, memberikan perlakuan dan tindakan serta melakukan penguatan dengan membuat berbagai kegiatan yang dimasukkan menjadi program kerja sekolah .

Secara umum kemampuan partisipasi komite sekolah dasar dalam menggerakkan organisasi dan membantu meningkatkan mutu layanan pendidikan masih perlu dikembangkan karena berbagai keterbatasan. Oleh sebab itu cukup penting dilakukannya penelitian strategi peningkatan partisipasi komite sekolah terutama di sekolah dasar melalui penelitian faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi peningkatan partisipasi komite sekolah saat ini.

Dari hasil wawancara, penelitian yang dilakukan sebelumnya dan hasil pertimbangan dosen pembimbing akademik terdapat adanya kesenjangan partisipasi komite sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan yang menyebabkan peneliti ingin meneliti bagaimana strategi yang dapat meningkatkan partisipasi komite sekolah tersebut.

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan paparan diatas, secara umum kemampuan partisipasi komite sekolah dasar di Kecamatan Subang dalam menggerakkan organisasi dan membantu meningkatkan mutu layanan pendidikan masih perlu dikembangkan karena berbagai keterbatasan. Hal ini teridentifikasi dari adanya beberapa permasalahan yang muncul yaitu :

1. Permasalahan dari sekolah : Sebagian besar sekolah kurang efektif dalam implementasi MBS
2. Permasalahan dari komite sekolah :
  - 1) Komite sekolah kurang terlibat dalam penyusunan program sekolah
  - 2) Partisipasi komite sekolah dalam penggalangan dana masih kurang
  - 3) Keterlibatan komite sekolah dalam mengawasi mutu layanan sekolah belum maksimal
  - 4) Komunikasi komite sekolah dengan *stakeholders* sekolah kurang efektif

Dari permasalahan tersebut tergambar yang menjadi akar permasalahannya adalah sekolah dan komite sekolah belum maksimal dalam meningkatkan mutu layanan Pendidikan di Kecamatan Subang , sehingga untuk mempermudah solusi permasalahan tersebut maka fokus penelitian ditujukan pada strategi partisipasi komite sekolah khususnya sekolah dasar di Kecamatan Subang dan posisi letak kuandran sekolah untuk memperjelas rekomendasi strategi dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan melalui evaluasi diri sekolah (EDS).

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan fokus penelitian maka rumusan masalah penelitian adalah :

1. Bagaimana rumusan strategi partisipasi komite sekolah dasar dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di Kecamatan Subang?
2. Bagaimana posisi kuandran sekolah untuk memperjelas rekomendasi strategi dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di Kecamatan Subang?

Dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus segera dijawab untuk menyelesaikan problematika strategi partisipasi komite sekolah khususnya sekolah dasar dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di Kecamatan Subang.

Nauli Susilawati, 2019

**STRATEGI PARTISIPASI KOMITE SEKOLAH DASAR DALAM MENINGKATKAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN DI KECAMATAN SUBANG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## **1.4 Tujuan Penelitian**

### 1.4.1 Tujuan Umum

Bertujuan merumuskan strategi partisipasi komite sekolah dasar dan menentukan posisi sekolah untuk memperjelas strategi dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di Kecamatan Subang.

### 1.4.2 Tujuan khusus

1. Merumuskan strategi partisipasi komite sekolah dasar dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di Kecamatan Subang.
2. Menentukan posisi kuadran sekolah untuk memperjelas rekomendasi strategi dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di Kecamatan Subang.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang mendalam dan komperhensip tentang strategi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Idealnya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa kepentingan, diantaranya:

### 1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian dan pengembangan teori kepada para pelaksana lembaga pendidikan dalam upayanya meningkatkan mutu layanan pendidikan.
2. Sebagai tambahan khazanah kelimuan di bidang merancang strategi partisipasi komite sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan.

### 1.5.2 Manfaat Praktis

#### 1. Bagi lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengelola lembaga pendidikan dan dijadikan masukan bagi komite sekolah dalam membantu meningkatkan mutu layanan pendidikan .

## 2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.

## 3. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman baru yang nantinya dapat dijadikan sebagai modal dalam membina hubungan kerjasama antara sekolah dan komite sekolah sesuai dengan disiplin ilmu penulis, terutama setelah terjun dalam dunia pendidikan

### **1.6 Struktur organisasi**

Format dan sistematika bagian utama tesis ini mengacu pada peraturan rektor Universitas Pendidikan Indonesia nomor 6449/UN40/HK/2017 tentang pedoman penulisan karya ilmiah UPI tahun akademik 2017 yaitu memuat antara lain :

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi pembahasan tentang 1.1 hal-hal yang melatarbelakangi penelitian, 1.2 identifikasi masalah penelitian, 1.3 rumusan masalah penelitian, 1.4 tujuan penelitian, 1.5 manfaat penelitian, dan 1.6 struktur organisasi penelitian.

#### **Bab II Kajian Pustaka**

Bab ini berisikan uraian teori yang digunakan sebagai dasar penelitian dan penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Hal-hal yang dibahas pada bab ini adalah 2.1 Manajemen Strategi 2.2 Manajemen Mutu Pendidikan, 2.3 Sekolah Efektif 2.4 MBS, 2.5 Komite sekolah, 2.6 Hasil Penelitian Yang Relevan, 2.7 Kerangka Pikir Penelitian.

### **Bab III Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Metodologi penelitian ini mencakup: 3.1 metoda dan desain penelitian, 3.2 tempat dan waktu penelitian, 3.3 populasi, sampel, dan sumber data, 3.4 identifikasi variable, 3.5 definisi operasional, 3.6 subyek penelitian, 3.7 teknik pengumpulan data, 3.8 instrumen penelitian, 3.9 ahap penelitian, 3.10 teknik analisis data, 3.11 pengecekan keabsahan data.

### **Bab IV Temuan dan Pembahasan**

Bab ini berisi uraian tentang temuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan pembahasan atas temuan selama penelitian. Temuan dan pembahasan ini meliputi : 4.1 Temuan umum penelitian berupa : A. Profil sekolah, B. Profil komite sekolah di SDN Rosela Indah dan SDN Karanganyar, C. Profil Dinas Pendidikan Kecamatan Subang 4.2 Temuan Khusus penelitian berupa : A. Gambaran mutu layanan pendidikan dan strategi yang dapat mempengaruhi partisipasi komite sekolah di SDN Rosela Indah, B. Gambaran mutu layanan pendidikan dan strategi yang dapat mempengaruhi partisipasi komite sekolah di SDN Karanganyar, 4.3 Pembahasan, 4.4 Keterbatasan penelitian.

### **Bab V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi**

Bab ini memuat kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dibahas pada bagian terdahulu, implikasi dari penelitian ini, dan rekomendasi kepada penelitian yang akan datang. Data dan pembahasan pada bab sebelumnya menjadi dasar untuk menggambarkan bab ini